



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 64, 2020

KEMENPAREKRAF. Perizinan Berusaha. Sektor Pariwisata. BKPM. Pendelegasian Kewenangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR  
PARIWISATA KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kemudahan berusaha sektor pariwisata yang cepat, mudah, dan transparan, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangiannya atas nama pemberi wewenang.
2. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
3. Pejabat Penghubung adalah pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan diberi kewenangan untuk mempercepat proses Perizinan Berusaha terkait Perizinan Berusaha di sektor pariwisata.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

## Pasal 2

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Kepala BKPM dengan hak substitusi.

## Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan seluruh Perizinan Berusaha sektor pariwisata.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha yang di dalamnya terdapat penanaman modal asing dan/atau penanaman modal dalam negeri lintas provinsi.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan pertimbangan teknis, Menteri menunjuk pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan diberi kewenangan untuk mempercepat proses Perizinan Berusaha terkait Perizinan Berusaha yang didelegasikan kewenangannya.
- (2) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan status sebagai Pejabat Penghubung pada PTSP di BKPM.
- (3) Penunjukan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dari Menteri.
- (4) Pembinaan administrasi pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan kinerja, tetap berada pada kementerian.
- (5) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honorarium atau pendapatan bentuk lain yang berlaku di BKPM.

#### Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala BKPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka sesuai dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

#### Pasal 6

- (1) Kepala BKPM dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Kepala BKPM menyampaikan tembusan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

#### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Perizinan Berusaha sektor pariwisata dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha tersebut.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha yang telah diterima dengan lengkap dan benar sebelum tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diproses penyelesaiannya sampai dengan diterbitkannya Perizinan Berusaha.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 472), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2020

MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA  
BADAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA